

PROGRAM RPJPD DALAM MEWUJUDKAN KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN

Hairunnisa¹, Cahalit Pungkasane²

^{1,2} Universitas Mulawarman

¹ hnisa.husain@gmail.com, ² cahalitpungkasane99@gmail.com

Abstract

The RPJPD program in realizing the city of Samarinda as a metropolitan city is the third stage of long-term regional development by the mandate of regional regulation no.4 of 2005 concerning the regional long-term development plan (RPJPD) of Samarinda city for 2005-2025. The VISION of this programming in the 2016-2021 period is to realize Samarinda as a competitive and environmentally friendly metropolitan city. The relationship between elements of the VISION of the city of Samarinda with sustainable development is seen from three important aspects, namely social aspects, economic aspects, and environmental aspects. The MISSION and nine priority agendas that emphasize governance, strengthen Samarinda city finances, create a livable city space, strengthen the service and trade sector as a leading sector, create Samarinda city people who are characterized, healthy, smart, and have national competitiveness and international life and create a harmonious, cultural, and religious climate of life for the people of Samarinda City.

Keywords: Development, Metropolitan City, Long Term Program

Abstrak

Program RPJPD dalam mewujudkan kota Samarinda sebagai kota metropolitan merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan amanat peraturan daerah no.4 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kota Samarinda tahun 2005-2025. VISI dari pemrograman ini dalam periode 2016-2021 adalah untuk mewujudkan kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Keterkaitan elemen VISI kota Samarinda dengan pembangunan berkelanjutan ini dilihat dari tiga aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Adapun MISI dan sembilan agenda prioritas yang menekankan pada tata kelola pemerintahan, memantapkan keuangan kota Samarinda, mewujudkan ruang kota yang layak huni, memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan, mewujudkan masyarakat kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional dan mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota Samarinda yang harmoni, berbudaya, dan religius.

Kata Kunci : *Pembangunan, Kota Metropolitan, Program Jangka Panjang*

A. PENDAHULUAN

Demi mewujudkan perkembangan Kota Samarinda menjadi kota yang semakin canggih dan metropolitan maka pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik juga harus memadai serta menjadi perhatian untuk peningkatan secara terus menerus, maka dibuat rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disebut RPJPD dengan 4 tahap yang akan dikelola oleh pemerintah dari tahun 2005-2025 diatur dalam amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. Dimana saat ini merupakan program tahap ke-3 masa 2016- 2021, yaitu "Pemantapan Sektor Unggulan Daerah dengan Pembangunan Berkelanjutan" dengan berbagai kendala dari beberapa faktor maka dirumuskan pada tahap ke-3.

Pengoptimalan SKPD terkait untuk mewujudkan Program RPJPD ini dalam mewujudkan kota samarinda sebagai kota yang berdaya saing tinggi dan berwawasan luas. Kota Samarinda memiliki wilayah yang luas dengan berbagai kawasan inti kota dan sekitarnya yang memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah sehingga program diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkembangan kota yang terus meningkat dan tentunya menghindari ketidak terkendaliannya aspek-aspek kota samarinda (Aspek sosial. Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan dan Aspek Keuangan Daerah).

Ketika program pemerintah ini berhasil dalam jangka panjang menghasilkan Smart Living, Smart People, Smart Governance, Smart Economy, Smart Development, dan Smart Environment. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengulik lebih dalam bagaimana komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas di Kota Samarinda yaitu: (1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Professional dan Inovatif; (2) memantapkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan; (3) mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni. (4), Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan. (5), Mewujudkan Masyarakat Kota Samarinda Yang Berkarakter, Sehat, Cerdas Serta Berdaya Saing Nasional Dan Internasional; dan (6) mewujudkan Iklim Kehidupan Masyarakat Kota Samarinda Yang Harmoni, Berbudaya, dan Religius.

Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah merupakan kombinasi antar nilai luhur daerah seperti religious, kebersamaan dan persatuan serta nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik dan pembangunan jati diri dilakukan melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan daerah serta budaya inovasi yang berorientasi IPTEK yg terus dikembangkan agar Kota Samarinda menguasai IPTEK serta mampu Berjaya di era persaingan global.

B. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal ini dikarenakan adalah proses penelitian ini lebih kepada mengamati terkait dengan dan juga tujuan

dari penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut dan dalam terkait dengan “Program RPJPD dalam mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan” yang ternyata sudah dibentuk sejak dari tahun ke tahun dan akan di implementasikan di Tahun 2021.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis

Kajian Teori merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan laporan penelitian ini. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahap-tahap dalam menganalisis permasalahan. Secara garis besar tinjauan teori meliputi elemen - elemen dalam Program RPJPD untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Metropolitan, definisi-definisi dari komponen penelitian ini.

a. Definisi RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, yang memuat visi, misi dan arahan pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun terhitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pembangunan daerah ini untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi

dalam pola sikap dan tindak bagi pelaku pembangunan.

b. Definisi Kota

Metropolitan Kota Metropolitan adalah sebuah daerah perkotaan besar yang memenuhi tiga aspek yaitu aspek social, aspek ekonomi dan aspek lingkungan seperti memiliki banyak jumlah penduduk, kegiatan industri, perdagangan, perbankan dan aktifitas perekonomian lainnya. Kota Metropolitan merupakan kota di mana banyak terdapat aktifitas perekonomian yang membantu perekonomian negara. Pemerintah berusaha mengembangkan kota metropolitan baik di pulau jawa dan di luar pulau jawa untuk menghindari adanya ketimpangan perekonomian.

c. Definisi Pembangunan Kota berkelanjutan Keberlanjutan (*sustainability*)

Secara umum berarti kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan ekosistem menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, produktivitas, dan keanekaragaman ekologis pada masa mendatang.

Berbagai pandangan di atas mengisyaratkan pentingnya dialektika yang perlu dipertimbangkan dalam memaknai keberlanjutan, yakni memposisikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tiga pilar utama dalam sistem kehidupan sebagaimana dinyatakan oleh Brundtland Commission. Jika dimensi ekonomi dan sosial dianggap dapat mewakili dan merepresentasikan tujuan

dan kegiatan pembangunan (*development*), maka keduanya perlu memiliki keterkaitan dengan dimensi lingkungan, termasuk sumberdaya alam. Pada hakikatnya keterkaitan (*overlapping*) ketiga pilar tidak sepenuhnya bersifat *mutually exclusive*, namun mampu menciptakan perkuatan satu dengan lainnya (*mutually reinforcing*).

Pemahaman pembangunan kota yang berkelanjutan dilandasi oleh pengertian kota atau perkotaan yang disepakati hingga kini. Berbagai definisi mengenai kota atau perkotaan yang dikembangkan pada dasarnya bersifat kontekstual terhadap fungsi dan pendekatan yang digunakan.

Pendekatan geografis-demografis memandang kota sebagai lokasi pemusatan penduduk yang tinggal bersama dalam ruang wilayah tertentu dengan pola hubungan rasional dan cenderung individualistik dengan ciri demografis relatif memiliki status pendidikan, ekonomi, dan sosial lebih tinggi dibanding wilayah nonperkotaan.

Pendekatan ekonomis memandang kota sebagai pusat peningkatan produktivitas dan produksi barang dan jasa, pertemuan lalu-lintas perdagangan dan kegiatan industri, serta tempat perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang tinggi. Pendekatan fisik memandang kota sebagai pusat dan sistem berbagai prasarana dan sarana untuk memfasilitasi kehidupan dan kreativitas warganya. Pendekatan sosiologis - antropologis memandang kota sebagai pemusatan penduduk dengan latar belakang heterogen, lambang peradaban kehidupan manusia, pusat kebudayaan, sumber inovasi dan kreasi, serta wahana

untuk peningkatan kualitas hidup. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan kawasan perkotaan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ciri-ciri kehidupan kota yang mendasari kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan kehidupan warga kota, yakni: (1). Merupakan konsentrasi penduduk, dalam arti jumlah, kepadatan, dan penambahan penduduk yang lebih tinggi; (2). Merupakan kawasan terbangun yang lebih massif; (3). Merupakan pusat produksi dan produktivitas barang dan jasa; (4). Bukan merupakan kawasan pertanian dalam arti luas; (5). Didominasi oleh permukiman kota, bangunan komersial, bangunan industri, bangunan pemerintahan, dan bangunan social; (6). Dilengkapi oleh prasarana dan sarana transportasi, ekonomi, dan sosial perkotaan: (7) Dilengkapi oleh utilitas air bersih, drainase, air kotor, persampahan, telepon, dan listrik; dan (8). Penduduk kota cenderung berlatar belakang heterogen, berpendidikan relatif lebih tinggi, berstatus ekonomi dan sosial lebih baik, bersifat rasional dan individualistik, dan memiliki inovasi dan kreativitas lebih maju. Perspektif ruang difokuskan pada ruang perkotaan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Urban 21 Conference (Berlin, July 2000) pembangunan kota berkelanjutan diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota dan warganya tanpa menimbulkan beban bagi generasi yang

akan datang akibat berkurangnya sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung-jawab dalam penghematan sumber daya pangan, air, dan energi; mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan; dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan.

Sesuai dengan karakteristik suatu kota, maka pembangunan kota berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga kota melalui peningkatan produktivitas di sektor sekunder dan tersier dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang layak dengan mempertimbangkan dampak invasi dan intensifikasi kawasan terbangun terhadap kerusakan lingkungan kota serta mensyaratkan keterlibatan yang tinggi dari warga kota terhadap upaya penghematan konsumsi sumberdaya alam dan pengendalian penurunan kualitas lingkungan. Terkait dengan pilar pembangunan berkelanjutan, konsepsi pembangunan kota berkelanjutan juga berlandaskan pada empat pilar utama, yakni dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang didukung oleh pilar governance.

Pembangunan kota menjadi Smart City Kota Cerdas (*smart city*) adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya

yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Kota cerdas merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.

Aset ini meliputi sistem informasi instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. Kota cerdas ditujukan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Hal ini membuat para pejabat kota dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota serta memantau keadaan dan perkembangan kota untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Dengan penggunaan sensor yang terintegrasi dengan sistem pemantauan waktu-nyata, data yang dikumpulkan dari warga dan perangkat dapat diolah dan dianalisis. Informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan adalah kunci untuk mengatasi inefisiensi.

Dari hasil penelitian yang sudah diamati terkait dengan "Program RPJPD dalam mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan" dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan program yang pada Tahun 2021 menjadi perwujudan dari tahap 3 dalam program RPJPD yang ada, memiliki fokus

yang kuat yang ditinjau dari aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan yang mampu menciptakan wawasan luas dan berdaya saing dalam mewujudkan Kota Samarinda sebagai "Kota Metropolitan".

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diamati dikaitkan dengan POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*), sebagai berikut ini :

a. *Planning* (Perencanaan)

Sesuai dengan visi program RPJPD tahap ke-3 ini adalah menciptakan Kota Samarinda yang berdaya saing dan juga berwawasan luas, bisa dilihat dari sumber daya manusia yang mumpuni dan pada akhirnya bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pada tahapan perwujudan organizing pada Program RPJPD dalam mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan, yaitu : (1). Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan juga inovatif; (2). Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan.; (3). Mewujudkan kota yang layak huni; (4). Memanfaatkan sector jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan; (5). Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional; dan (6). Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religious.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Pada tahapan ini berarti adalah bagaimana pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan program RPJPD dalam membentuk Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan ke dalam mewujudkan program yang berhasil dan sukses.

Pada hal ini pemerintah Kota Samarinda mengaktualisasikan kerjanya dengan : (1). Memiliki wawasan ke depan; (2). Berusaha untuk memiliki keterbukaan dan transparasi dalam menjalankan program RPJPD tahap ke-3; (3). Mencoba untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan program RPJPD tahap ke-3; (4). Memiliki rasa tanggung gugat; (5). Berada pada supremasi hokum; (6). Bergerak secara demokrasi; (7). Berusaha untuk bekerja dengan profesionalisme dan berdasarkan kompetensi sebagai perwujudan program RPJPD tahap ke-3; (8) Daya Tanggap yang mumpuni dalam memperhatikan segala aspek yang sudah ditentukan dan kemudian akan dilaksanakan dalam mewujudkan keberhasilan program RPJPD tahap ke-3; (9) keefisienan dan keefektifan dalam mewujudkan program RPJPD tahap ke-3; (10) Desentralisasi; (11) kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, hal ini sangat penting dalam memajukan sektor jasa dan perdagangan seperti pada tujuan program RPJPD tahap ke-3; dan (12). Komitmen terhadap lingkungan hidup yang ada di Kota Samarinda. 13. Komitmen pasar yang fair atau adil di lingkungan Kota Samarinda.

d. *Controlling* (Pengendalian)

Dilihat pada tahapan ini, Kota Samarinda berusaha untuk mewujudkan :

(1) menyediakan aparatur yang profesional dan kompeten dalam memantau pelaksanaan yang secara prima; dan (2). berusaha untuk mewujudkan keuangan daerah Kota Samarinda yang mandiri dan fokus pada program prioritas.

D. SIMPULAN

Program RPJPD tahap ke-3 merupakan kelanjutan pembangunan tahap ke-2 dalam perwujudan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang merupakan kabar baik bagi masyarakat. Dengan konsep Smart City yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat Kota Samarinda dalam mendapat pelayanan atau tanggapan pembangunan yang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Sippa, (2016). online available at ; [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_147977961005_BAB_V_\(03082016\).pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_147977961005_BAB_V_(03082016).pdf) diunduh pada 13 juni 2021

Pemerintah Samarinda Kota (2015). dokumen perencanaan, website, available at ; <http://samarindakota.go.id/website/perencanaan/rpjmd> diunduh pada 13 juni 2021.